



2021

LAPORAN KINERJA (LKj)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Jln. H. Agus Salim Painan, (0756) 21602
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id//>

Disusun Oleh :
Tim Perencanaan & Pelaporan
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Revisi - Program
Gusti $\frac{4}{3}$ - 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Pairipan, Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 11 Sasaran Strategis dan 27 indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

MISI 4 : Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 125,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2021		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	1	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	100
1.2	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari		Jumlah cagar budaya yang lestari	Unit	18	18	100
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori ***Sangat Baik***. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	2021		
					Target	Realisasi	Capaian(%)
1.1	Meningkatkan akses Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,27	100
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,33	100
1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Lembaga pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)	Persen	60	58	96,66
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5							

DAFTAR ISI

Halaman

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Struktur dan Organisasi.....	6
E. Sumber Daya Manusia.....	8
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Perencanaan Kinerja.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja.....	13
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	15
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	22
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	25
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan.....	26
B. Upaya Dimasa Mendatang.....	
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2. Review Inspektorat	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKj (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas-asas otonomi dan tugas pembentukan.

Otonomi seluas-luasnya dalam arti diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat secara luas dan komprehensif, tentunya semuanya itu berpijak pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, perlu untuk mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas, terukur dan sah sehingga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LKj merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan.



B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
- x. Peraturan Bupati Kabupaten pesisir selatan nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja, umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program / kegiatan di tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

D. Struktur Organisasi

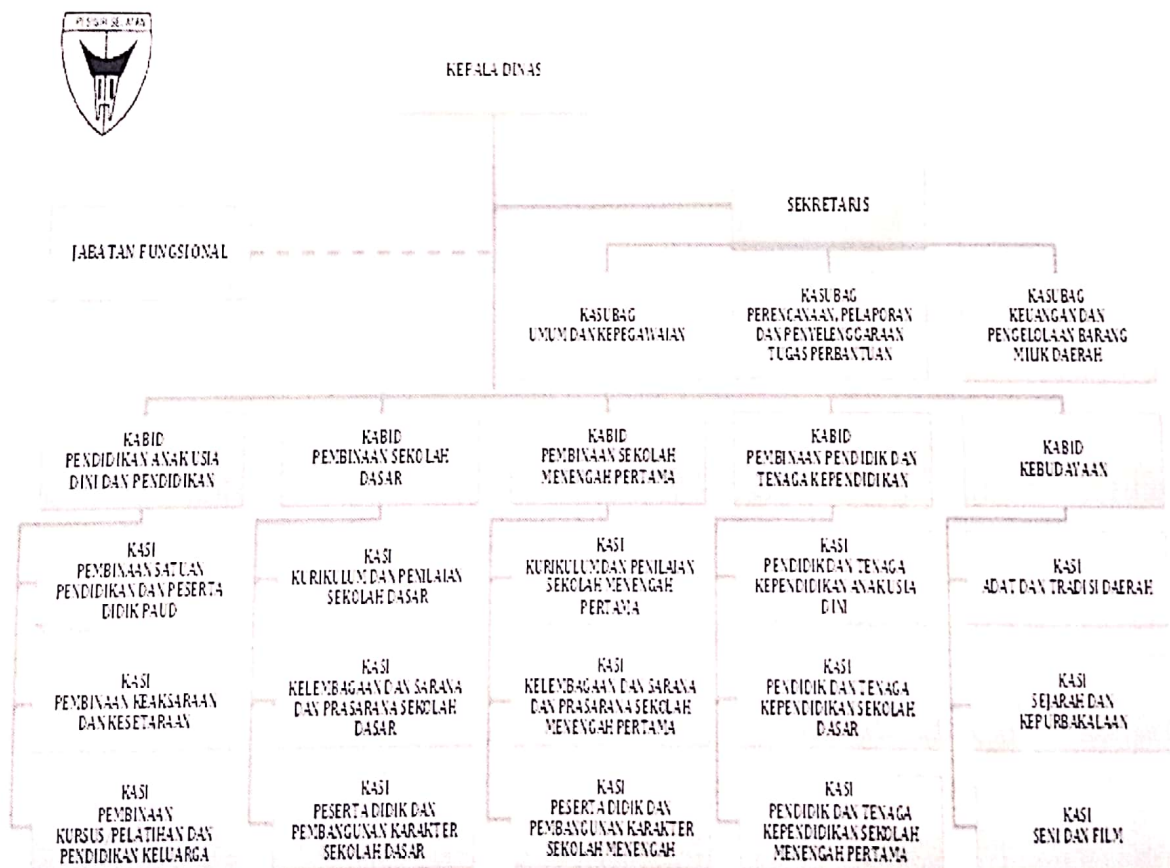
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b. Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga;
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
 4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Adat dan Tradisi Daerah;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Seni dan Film.
6. Satuan Pendidikan Formal;
7. Satuan Pendidikan Non Formal Informal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



E. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut diuraikan dalam bentuk tabel :

1. Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	48	81,36
2	Fungsional	10	18,64
	Jumlah	58	100,00

2. Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Struktural Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	18
4	Fungsional Umum (Staf)	24
	Jumlah	48

3. Tabel 1.3. Data Pegawai Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	18
2	Strata 1 (S1)	22
3	Diploma 3 (D3)	3
4	SLTA	15
	Jumlah	58

4. Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	23
2	Golongan III	25
3	Golongan II	10
	Jumlah	58

Berdasarkan tabel – tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 58 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 48 orang dan pegawai fungsional sebanyak 10 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 48 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV sebanyak 18 orang, staf berjumlah 22 orang. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 10 orang terdiri dari pengawas SMP. Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 18 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 24 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 3 orang, dan lulusan SLTA sebanyak 15 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 25 orang, golongan II sebanyak 10 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rentras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional", adapun misinya adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dari Enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi lima untuk urusan pendidikan dan misi empat untuk urusan kebudayaan. Dari misi lima tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah *"Terwujudnya pendidikan yang berkualitas"*. Dari misi lima tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: *"Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas"*. Dengan sasaran " antara lain :
1). *Meningkatnya akses layanan bidang Pendidikan, dan 2). Meningkatkan Daya Saing Pendidikan"*.

Sementara itu, untuk urusan yang terkait pada Kebudayaan ada pada misi empat, dengan tujuan: “*Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata*. Dengan sasaran “Meningkatnya kontribusi kekayaan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Adapun kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah :

1. Meningkatnya Rata-rata lama sekolah;
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
3. Mewujudkan Pesisir Selatan Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak (Pasisia Rancak);
4. Meningkatnya Fungsi dan Peran Lembaga adat dan agama
5. Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam Penetapan Kinerja/ Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	13,33
		2. Rata- Rata Lama Sekolah	8,27
2	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A	65
		Persentase anak didik melanjutkan ke PT	-

3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan Sejarah	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan	3 Jenis
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	20 Jenis

Tabel 2.2.
Anggaran Tahun 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	482.153.074.958	APBD
2	Pengelolaan Pendidikan	112.809.047.095	APBD & DAK
3	Pengembangan Kurikulum	121.705.379	APBD
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.918.853.262	APBD
5	Pengembangan Kebudayaan	448.990.880	APBD
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	100.000.000	APBD
7	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	213.173.792	APBD
Jumlah		606.764.845.366	

C. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA /PENANGGUNG JAWAB	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akses Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	<u>jumlah penduduk usia 7 th yang bersekolah</u>	Bidang Pembinaan PAUD, SD dan SMP	13,33	13,33	13,34	13,34	13,35	13,35
		Jumlah penduduk usia 7 th di tahun 2022							
	Rata-Rata Lama Sekolah	<u>Lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun</u>	Bidang Pembinaan PAUD, SD dan SMP	8,27	8,27	8,28	8,28	8,29	8,29
		jumlah penduduk usia 25 tahun keatas							
Meningkatkan daya saing pendidikan	Lembaga pendidikan SD dan SMP akreditasi A (jml)	<u>Jumlah Sekolah Berakreditasi A</u>	Bidang Pembinaan GTK, SD dan SMP	60	65	70	75	80	85
		Jumlah Sekolah keseluruhan							
	Persentase anak didik melanjutkan ke PT	<u>Jumlah siswa usia 19 tahun ke atas yang melanjutkan ke PT</u>							
		Jumlah penduduk 19 tahun ke atas							
Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan sejarah	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	<u>Jumlah seni budaya yang dibangun</u>	Bidang Budaya	2	3	4	5	6	7
		Jumlah seni budaya yang terinventarisir							

Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dirawat	Bidang Budaya	18	20	22	24	26	28
		Jumlah cagar budaya yang terinventarisir							

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Sesuai kontrak kerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 sasaran dan 6 indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah " Sangat Berhasil" dengan nilai 93,16 %.

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021
Sesuai Revisi Renstra Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan akses pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,27	100
		2. Harapan Lama Sekolah	13,33	13,33	100
2	Meningkatnya daya Saing Pendidikan	Lembaga Pendidik SD dan SMP Akretasi A (jml)	60	58	96,66
		Persentase anak didik melanjutkan ke PT	-	-	-
3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	2	2	100
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	18	18	100
Jumlah Capaian Kinerja					496,66%
Rata-rata Persentase Capaian					99,332%

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan pelaksanaan 6 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 rata-rata menunjukkan capaian 100% bahkan melebihi. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level *outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja indikator secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar OPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam meningkatkan akses dan daya saing pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat belajar dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih dari peringkat IPM periode sebelumnya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan daya saing Pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama yang ada dalam perjanjian kinerja yaitu :

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatkan Akses Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,27	100
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,33	100

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

- A. Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.
- B. Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut.
 - a) Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0.
 - b) Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolahnya mengikuti tabel konversi berikut.

Berikut rumus mencari Rata-rata Lama Sekolah :

$$\text{Rata - Rata Lama Sekolah} : \frac{\text{Lama Sekolah Penduduk usia 25 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas}}$$

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

Berikut rumus mencari Harapan Lama Sekolah :

Harapan Lama Sekolah

Jumlah penduduk usia 7 tahun yang bersekolah

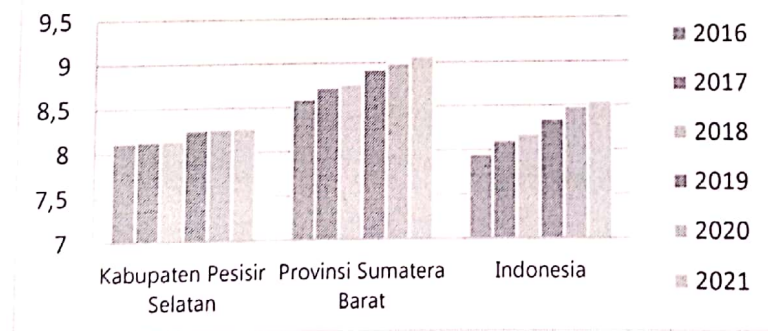
Jumlah penduduk usia 7 tahun di tahun 2022

Tabel 3.2
Perkembangan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia Tahun 2016 – 2021

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten pesisir selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
2	Provinsi sumatera barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
3	indonesia	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2021

Grafik 3.1
Perkembangan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah , dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sebesar 8,12 naik menjadi 8,27, untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 8,59

naik menjadi 9,07 dan untuk wilayah Indonesia tahun 2016 sebesar 7,95 naik menjadi 8,54 di tahun 2021.

2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2. Meningkatnya daya saing Pendidikan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml)	Persen	60	58	96,66
2	Persentase anak didik melanjutkan PT	-	-	-	-

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Berikut rumus mencari :

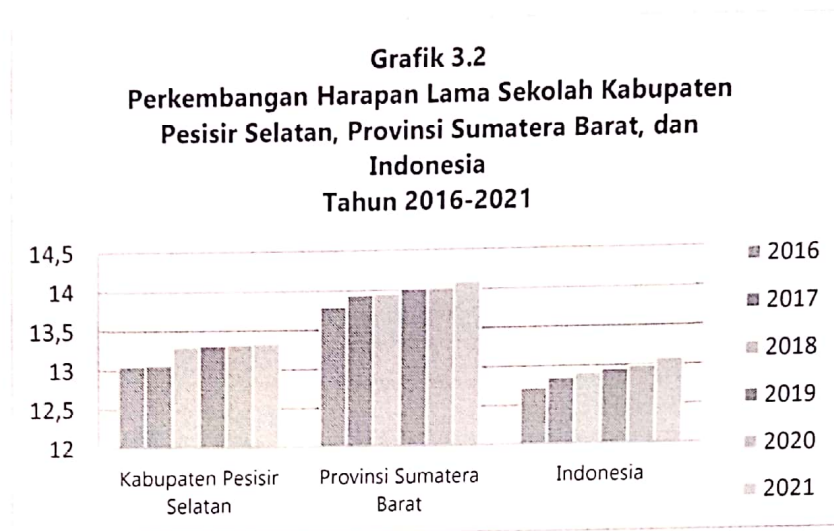
Lembaga pendidik SD dan SMP akreditasi A (jml) : $\frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah keseluruhan}}$

Tabel 3.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2016 – 2021

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32	13,33
2	Provinsi Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09

3	Indonesia	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2021



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan Harapan Lama Sekolah, dimana untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sebesar 13,05 naik menjadi 13,33 pada tahun 2021 dan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 13,79 naik menjadi 14,09 di tahun 2021 sedangkan untuk wilayah Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 menjadi 13,08 di tahun 2021.

3. Revitalisasi Kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah

Persentase Seni Budaya yang dilestarikan menunjukkan berapa banyak seni budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan dalam bentuk persen (%).

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Seni budaya yang dilestraikan	Unit	2	2	100

Tabel 3.5

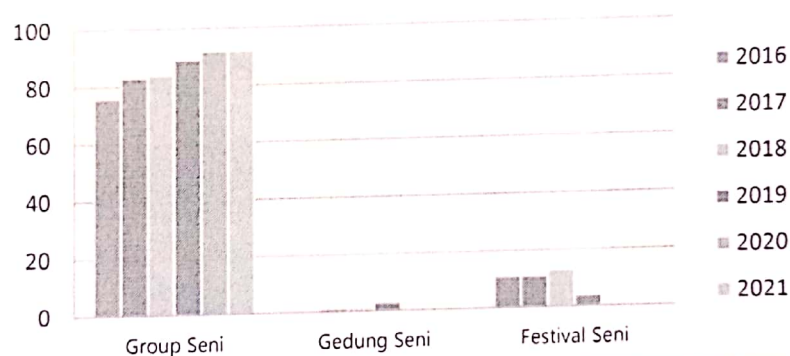
Perkembangan Seni Budaya yang dilestarikan

Tahun 2016 - 2021

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Group Kesenian	76	83	84	89	92	94
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	1	1	3	0	0
3	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11	11	13	4	0	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2021

Grafik 3.4
Perkembangan Seni Budaya Yang Dilestarikan
Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

4. Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan

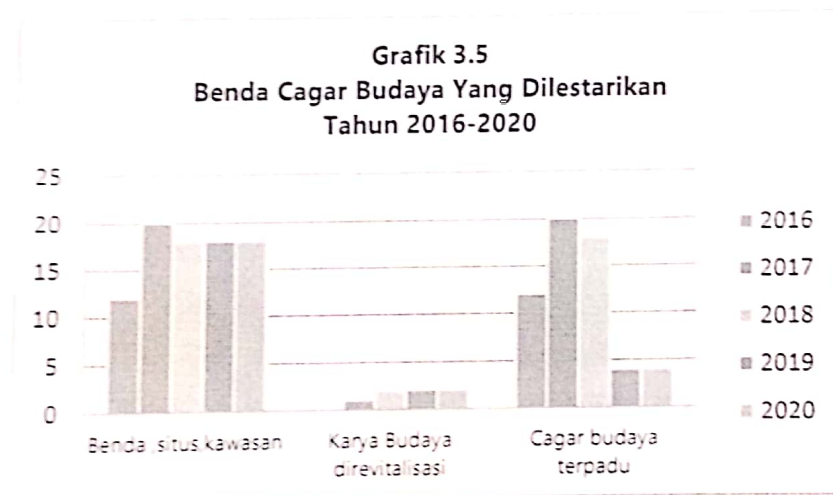
Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan berapa banyak cagar budaya yang telah dilestarikan/ yang dikembangkan.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah cagar budaya yang lestaRI	Unit	18	18	100

Tabel 3.6
Benda Cagar Budaya yang dilestarikan
Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya	12	20	18	18	18	18
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	2	2	2	2
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	20	18	4	4	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan efisiensi anggaran APBD untuk bidang kebudayaan. Untuk itu diharapkan kedepannya jika anggaran sudah ada maka hasilnya akan lebih meningkat dari pada tahun ini.

Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2021

No	Program 2020	Program 2021	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse ntase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persent ase (%)
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.071.782.650	1.997.508.951	96,41	482.153.074.958	445.851.412.883	92,47 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengelolaan Pendidikan	113.391.000	111.450.948	98,29	113.029.047.095	109.337.879.231	96,73 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengembangan Kurikulum	808.279.000	796.287.850	98,52	121.705.379	106.564.500	87,55 %
4	Wajib Belajar Sembilan Tahun	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	105.546.882.658	104.414.028.047	98,93	10.918.853.262	9.438.244.500	86,44 %
5	Pendidikan Non Formal	Program Pengembangan Kebudayaan	1.051.409.300	1.030.137.300	97,98	448.990.880	445.584.880	99,24 %
6	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	11.371.556.650	11.333.789.250	99,67	313.173.792	310.797.200	99,24 %
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan		149.549.800	144.573.652	96,67			
8	Pengembangan Nilai Budaya		0	0	0			
9	Pengelolaan		0	0	0			

Kekayaan Budaya							
	Jumlah	121.112.851.058	119.827.775.998	98,94	606.984.845.366	565.490.483.144	93,16 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 mengalokasikan jumlah Belanja Operasi sebesar Rp. 581.784.997.052 dan Belanja Modal sebesar Rp. 25.199.848.314. Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2021 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan akses pendidikan	47.561.871.353	43.014.824.296	90,44 %
2	Meningkatnya daya saing Pendidikan	557.551.829.341	520.771.177.768	93,40 %
3	Revitalisasi kekayaan budaya, kearifan local dan sejarah	548.990.880	545.584.880	99,38 %
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	213.173.792	210.797.200	98,89 %
Jumlah		606.984.845.366	565.490.483.144	93,16%

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 606.984.845.366 dengan belanja Operasi sebesar Rp. 581.784.997.052 dan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 565.490.483.144 atau capaian kinerja keuangan sebesar 93,16%.

Beberapa hambatan dan kendala daya serap APBD dan APBN sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, antara lain adalah :

1. Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif, dan integratif;
2. Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi;
3. Efisiensi anggaran akibat Pilkada dan wabah virus Covid-19.

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD dan APBN sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan, yaitu :

1. Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya;
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang;
3. Meminimalisasi penanganan wabah covid-19 secara efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Sasaran

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026. Secara Keseluruhan tingkat capaian sasaran strategis telah mencapai target, dengan capaian targetnya 100 %.

2. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 6 yaitu : Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama sekolah, Lembaga Pendidik SD dan SMP Akreditasi A (jml) persentase anak didik melanjutkan ke PT, jumlah seni budaya yang dilestarikan dan persentase benda cagar budaya yang dilestari. Dari 6 Indikator Kinerja Utama tersebut dapat di simpulkan bahwa secara umum telah mencapai target Karena Rata-rata menunjukan capaian 99,33 %.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran

Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 565.490.483.144 atau 93,16% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 606.984.845.366 Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Revitalisasi kekayaan budaya kearifan lokal yaitu 99,38 % dan sejarah dan Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari " yaitu 98,89 % dan terendah adalah "Meningkatkan akses pendidikan" yaitu 90,44%.

B. Saran

Untuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan perencanaan strategis yang di dalamnya berisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dipertanggung jawabkan, sasaran strategis tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pengukuran Kinerja yang ideal perlu dijelaskan unsur-unsur Renstra yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategis dan faktor pendukung keberhasilan yang akan ditemukan

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, dimana dalam perumusan Visi dan Misi disesuaikan dengan keadaan operasional lapangan.

Palmang, Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSMARDI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pesisir Selatan
Selanjutnya disebutkan PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Desember 2021

Pihak Kedua

Bupati Pesisir Selatan

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan



YUSMARDI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19650329 198410 1 001

Plt. Nomor 821.2/338/ BKPSDM-2021

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	APK PAUD	Harapan Lama Sekolah	45,75%	13,33%
			APK SD	Rata-rata Lama Sekolah	124,12%	8,27%
			APK SMP		105,77%	
			APM SD		99,9%	
			APM SMP		90,72%	
			ANGKA PUTUS SEKOLAH SD		0,07	
			ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP		0,12	
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	Rata-rata nilai UN	Lembaga Pendidik SD dan SMP akreditasi A	6,75	65%
			Persentase Sekolah Berakreditasi A dan B	Persentase anak didik melanjutkan ke PT	75%	
3	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional	Revitalisasi Kekayaan budaya, kearifan lokal dan Sejarah	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah Seni budaya yang dilestarikan	50%	2 Jenis
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang lestari	Meningkatnya benda cagar budaya yang	Persentase cagar budaya yang lestari	Jumlah Cagar Budaya yang lestari	50%	18 Jenis

NO	Program	Anggaran	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 492.121.895.797	Rp 482.153.074.958
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 106.273.443.735	Rp 112.809.047.095
3	Program pengembangan Kurikulum	Rp 121.855.379	Rp 121.705.379
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.683.353.296	Rp 10.918.853.262
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 758.984.000	Rp 448.990.880
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000
7	Program Pembinaan Sejarah	Rp 60.000.000	Rp -
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 213.173.922	Rp 213.173.792
Total Anggaran		Rp 612.352.706.129	Rp 606.764.845.366

BUPATI PESISIR SELATAN

DRS. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Panahan, Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YUSMARDI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650329 198410 1 001
Pir, Nomor 821.2/388/BKPSDM-2021
Tanggal 29 Oktober 2021